SKRIPSI

KEBIJAKAN TATA RUANG DAN MULTIKULTURALISME

(Studi Kasus Penataan Kawasan Pendidikan Terhadap Praktik-Praktik Multikultur Di Padukuhan Seturan, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)

Disusun Oleh :

FAIZ IRSYAD ABIDIN

18520245

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA-1

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2021

KEBIJAKAN TATA RUANG DAN MULTIKULTURALISME

(Studi Kasus Penataan Kawasan Pendidikan Terhadap Praktik-Praktik Multikultur Di Padukuhan Seturan, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)

SKRIPSI

Disusun Sebagai Tugas Akhir Untuk Memenuhi

Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1

Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Disusun Oleh:

FAIZ IRSYAD ABIDIN

18520245

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA-1

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada:

Hari	: Jumat
Tanggal	: 8 Oktober 2021
Pukul	: 09.00 WIB
Tempat	: Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA	TANDA TANGAN
1. **Drs. Sumarjono, M.Si** Ketua Penguji / Pembimbing	
2. **Rr. Leslie Retno Angeningsih, Ph.D** Penguji Samping I	
3. **Dra. Tri Daya Rini, M.Si** Penguji Samping II	

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Faiz Irsyad Abidin
Nomor Mahasiswa	: 18520245
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul "***KEBIJAKAN TATA RUANG DAN MULTIKULTURALISME (Studi Kasus Penataan Kawasan Pendidikan Terhadap Praktik-Praktik Multikultur Di Padukuhan Seturan, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)***" ini benar-benar hasil karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini telah disebutkan dalam teks dan tercantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 8 Oktober 2021

Yang Menyatakan

Faiz Irsyad Abidin

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: Ayat 5-6)

“Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang maka dia diberi pemahaman dalam ilmu agama. Sesungguhnya memperoleh ilmu dengan belajar”

(H.R Bukhari)

“Kamu tidak bisa kembali dan mengubah awal saat kamu memulainya, tetapi kamu bisa memulainya lagi sekarang dan mengubah akhirnya”

(C.S. Lewis)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Pertama saya ucapkan puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan saya rahmat, karunia, dan kekuatan untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini, dan juga menyelesaikan perkuliahan. Selanjutnya saya persembahkan karya ini kepada dua orang tua saya, Nur Achmadi dan Siti Rusiyah. Terima kasih untuk kesabaran bapak dan ibu untuk menunggu dan menyadarkan saya untuk meraih gelar sarjana, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena seringkali mengecewakan bapak dan ibu terkait perkuliahan saya. Selanjutnya, saya juga persembahkan skripsi ini kepada saudara-saudara saya, Nurazka Lathif dan Nur Afifah. Akhirnya saya menyadari bahwa hasil caci maki kalian kepada saya benar adanya, akhirnya saya dapat menyelesaikan perkuliahan walaupun terbilang lama.

Setelah itu, skripsi ini juga saya persembahkan kepada dosen-dosen yang telah membantu saya untuk menyelesaikan naskah beserta perkuliahan ini. Pertama kepada dosen pembimbing akademik saya, Mas Soni Fatih Gama yang selalu membantu dan mencarikan solusi untuk semua permasalahan saya selama di kampus, mungkin karena beliau tau saya sudah menjadi “macan kampus” untuk waktu yang lama. Lalu, kepada bapak Sumarjono sebagi dosen pembimbing skripsi saya, karena beliaulah skripsi ini cepat terselesaikan walaupun tetap santai dalam membimbing mahasiswa tua macam saya.

Selanjutnya, untuk teman-teman kampus saya, walaupun kalian masih bocah semua, tetap membantu saya dalam pengerjaan skripsi ini. Pertama Adong Gondes, Gunawan, Mikhael, Beni, Revo, Daniel, Rivaldo, Ratu, Icha, Clara, Soni, Jaqueline, Victor Yanto, Abiol Kum, Ito, Iverson, Yance, Edmin Lau, Aris Acil, Gregor, Richard, Afen, dan terakhir tandem macan kampus saya yang terhormat, Hasdian Isnan Kamal (Odi) yang membantu saya dalam mensukseskan seluruh pengerjaan skripsi ini, walaupun dia meninggalkan saya karena wisuda duluan.

Terakhir, karya ini saya persembahkan kepada semua orang yang selalu bertanya;

“KAPAN LULUS?”

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"KEBIJAKAN TATA RUANG DAN MULTIKULTURALISME (Studi Kasus Penataan Kawasan Pendidikan Terhadap Praktik-Praktik Multikultur Di Padukuhan Seturan, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)"** .

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta. Pada Kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, MA selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD" Yogyakarta.
3. Bapak Fatih Gama Abisono Nasution, S.IP., MA selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk pembuatan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Sumarjono, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan banyak membantu dalam membimbing pembuatan skripsi ini.
5. Ibu Rr. Leslie Retno Angeningsih, Ph.D selaku penguji samping I yang telah mengarahkan dan memberikan saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dra. Tri Daya Rini, M.Si selaku penguji samping II yang telah mengarahkan dan memberikan saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen, serta segenap karyawan Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD" Yogyakarta.
8. Pamong Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah membantu dalam memberikan izin dan informasi untuk kelancaran pengerjaan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan di kampus STPMD "APMD" yang telah membantu memberi saran, masukan, dan juga penilaian untuk lancarnya pengerjaan skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Yogyakarta, 8 Oktober 2021
Penulis

Faiz Irsyad Abidin

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang kebijakan tata ruang wilayah khususnya kawasan pendidikan dan multikulturalisme di Padukuhan Seturan. Alasan mengangkat topik ini adalah melihat dan mengetahui bagaimana masyarakat dalam satu wilayah atau melakukan aktivitas kehidupan mereka setiap hari yang dipengaruhi kebijakan tentang tata ruang yang berada di wilayah tersebut. Penataan ruang wilayah bertujuan untuk menggali potensi pada wilayah yang direncanakan, seperti potensi pendidikan. Dengan begitu dibentuklah kawasan pendidikan untuk menunjang potensi tersebut. penunjang kawasan pendidikan juga marak menjamur di sekitaran kawasan, dan mempengaruhi aspek-aspek kehidupan warga di wilayah tersebut. Akan tetapi juga menimbulkan masalah seperti eksklusifitas dan ego kedaerahan yang tercipta akibat kebijakan tata ruang wilayah. Oleh sebab itu kajian ini merumuskan tentang mengetahui bagaimana kebijakan tata ruang dalam mempengaruhi multikulturalisme penduduk di Padukuhan Seturan dan mengetahui fungsi yang mempengaruhi kebijakan multikulturalisme penduduk di Padukuhan Seturan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan metode kajiannya yaitu studi kasus. Untuk lokasi penelitian bertempat di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik pengambilan data bersumber dari data primer dan sekunder seperti teknik observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Penentuan informan mengunakan teknik purposif. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 2 orang Perangkat Desa, dan 10 orang masyarakat. Sedangkan teknik analisis data menggunakan rangkaian kerja menurut Miles dan Huberman, meliputi tahapan; *data reduction*, *data display*, dan *conclusion/verification*. Langkah terakhir adalah uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu memeriksa keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu data yang lain.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dari data yang didapat, baik primer maupun sekunder, maka tata ruang wilayah untuk kawasan pendidikan di Padukuhan Seturan memberikan dampak pada menjamurnya tempat wisata dan banyaknya akomodasi untuk wisatawan pada aspek pariwisata. Lalu, menaikan taraf ekonomi dan menimbulkan keberagaman ide ekonomi dan bisnis pada aspek ekonomi. terakhir, memberikan perubahan pola interaksi sosial dan juga timbulnya kesan eksklusif pada aspek sosial budaya. Kesimpulannya Multikulturaliseme sangat mempengaruhi tata ruang kawasan pendidikan beserta dinamika didalamnya. Pengaruh pada aspek pariwisata adalah bervariasinya sarana wisata, walaupun tidak berasal dari kawasan tersebut. Untuk aspek ekonomi ialah banyaknya pilihan ide ekonomi berbasis kedaerahan. Terakhir untuk aspek sosial budaya, multikulturalisme mempengaruhi sikap dan pandangan sesama warga di dalam kawasan. Secara garis besar, pengaruh mutikulturalisme dalam penataan kawasan pendidikan tidak bisa hanya dilihat secara sudut pandang geografis semata, tetapi juga harus berdasarkan sudut pandang demografis.

Kata Kunci: Multikulturalisme, Kawasan Pendidikan, Kebijakan, Tata Ruang Wilayah

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini mengkaji tentang kebijakan tata ruang wilayah dan multikulturalisme antara penduduk lokal dengan pendatang dan pendatang dengan pendatang yang menempati atau berada dalam satu wilayah atau melakukan aktivitas setiap hari di wilayah yang sama otomatis akan mempengaruhi tentang bagaimana kebijakan tentang tata ruang yang berada di wilayah tersebut. Tata ruang atau dalam bahasa Inggrisnya *spatial plan* adalah wujud struktur ruang dan pola ruang disusun secara nasional, regional dan lokal. Pengertian tata ruang menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

Menurut (Kusuma, 2012) fungsi tata ruang salah satunya adalah pedoman sekaligus dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan atau pengembangan wilayah. Dalam pengendalian manfaat ruang diperlukan acuan-acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan, hubungan antar warga yang berada di wilayah tersebut dan bagaimana sikap dan sifat penduduk lokal terhadap pendatang yang menempati wilayah mereka dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Hal tersebut sangat diperlukan peran dari pemerintah daerah dalam mengembangkan fungsi tata ruang.

Kusuma menambahkan bahwa untuk mewujudkan sasaran penataan ruang dan penataan pertanahan demi menjaga kelestarian lingkungan hidup,

maka kebijaksanaan pokok yang nanti dapat ditempuh yakni dengan jalan mengembangkan kelembagaan melalui penetapan organisasi pengelolaan yang mantap, dengan rincian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas, meningkatkan kemampuan aparatur yang dapat mendukung kegiatan penataan ruang dan penataan pertanahan demi menjaga kelestarian lingkungan hidup, memasyarakatkan penataan ruang. Penataan pertanahan demi menjaga kelestarian lingkungan hidup kepada masyarakat dan dunia usaha serta unsur lain, memantapkan pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan bagi pembangunan daerah dengan perhatian khusus pada kawasan cepat berkembang dan kawasan andalan, serta kawasan strategis dan memantapkan pengendalian pemanfaatan ruang termasuk pengamanan terhadap kawasan yang memiliki aset penting bagi pemerintah daerah.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang mempunyai perkembangan wilayah cukup pesat. Hal ini ditandai dengan fenomena pertumbuhan pembangunan secara pesat di sebagian wilayah perkotaan di Yogyakarta sebagai Pusat Kegiatan Nasional. Cepatnya pembangunan ekonomi yang diiringi dengan semakin tingginya jumlah penduduk dan padatnya bangunan-banguanan untuk tempat tinggal maupun aktifitas ekonomi dan pendidikan, memerlukan perhatian yang serius karena beberapa hal tersebut juga perlu diikuti dengan ketersediaan lahan serta kestabilan daya dukung dan daya tampungnya.

Perencanaan pembangunan daerah seperti yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 adalah suatu proses

penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan dalam suatu wilayah mempunyai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Pembangunan tidak hanya berfokus pada sumber daya manusia dan ekonomi saja, namun juga perlu juga diiringi dengan perencanaan pembangunan fisik yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat suatu daerah. Pemanfaatan ruang serta interaksi berbagai kegiatan dalam ruang wilayah sehingga terlihat perbedaan fungsi ruang yang satu dengan yang lainnya. Pembangunan juga memperhatikan interaksi antar ruang untuk diarahkan kepada tercapainya kehidupan yang efisien, nyaman dan bermanfaat. Pemusatan kegiatan di perkotaan membuat tingkat kepadatan penduduk terus bertambah, keadaan tersebut kemudian sejalan dengan semakin meningkatnya laju pembangunan sebagai upaya pemenuhan sarana infrastruktur yang harapannya dapat mampu meningkatkan kesejateraan masyarakat diperkotaan.

Sebagai kota pendidikan hingga kini Yogyakarta masih menjadi “magnet” bagi pelajar dan mahasiswa untuk menuntut ilmu di Yogyakarta. Tentu ada beberapa alasan mengapa meraka memilih Yogyakarta sebagai tempat untuk menuntut ilmu. Sebagai konsekuensi predikat tersebut, maka mendorong tumbuhnya asrama mahasiswa/pelajar yang ada di Yogyakarta. Sering kali Yogyakarta mendapat sebutan sebagai “Indonesia Mini”, karena

hampir setiap suku bangsa yang ada di Indonesia dapat di jumpai di Yogyakarta melalui perwakilan asrama mahasiswa/pelajar.

Hadirnya asrama mahasiswa sebagai tempat tinggal mahasiswa tentu menimbulkan permasalahan baru terutama menyangkut bagaimana mereka saling berinteraksi, baik interaksi antar penghuni asrama maupun interaksi penghuni asrama dengan masyarakat sekitar seperti yang tertera dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2039.

Pada perkembangannya, tata ruang wilayah untuk pelayanan pendidikan di Kalurahan Caturtunggal secara umum, dan padukuhan Seturan secara khusus dimulai semenjak adanya studi tentang Pengembangan Perkotaan Yogyakarta yang lebih kenal dengan *Yogyakarta Urban Development Project* tahun 1990. Proyek ini mencakup Kota Yogyakarta, sebagian wilayah Kabupaten Sleman (seluruh wilayah Kapanewon Depok) dan sebagian lagi dari wilayah Kabupaten Bantul. Wilayah yang memiliki potensi untuk berkembang pada awalnya kawasan utara yakni wilayah Kabupaten Sleman, perkembangan terjadi sebagai akibat dari penempatan kawasan pendidikan, perumahan dan jasa. Selanjutnya pada dekade terakhir perluasan wilayah kota diarahkan ke bagian selatan atau wilayah Kabupaten Bantul, dengan menempatkan kawasan pendidikan, perumahan, perdagangan dan jasa lainnya diwilayah selatan perkotaan Yogyakarta akhirnya mengarah ke wilayah pinggiran kota, yang secara administratif termasuk dalam wilayah Kabupaten

Bantul dan Kabupaten Sleman. Pertambahan penduduk di kota Yogyakarta diikuti dengan dinamika aktivitas perkotaan yang selanjutnya dalam perencanaan wilayah provinsi DIY dibuat konsep Kawasan Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta.

Penjalaran fisik/area terbangun yang berciri kekotaan, membentuk simpul-simpul kegiatan dalam Kawasan perkotaan Yogyakarta. Kawasan Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta memiliki beragam pusat aktivitas kota mulai perkantoran, komersial, kebudayaan sampai fungsi pendidikan. Dengan adanya berbagai pusat aktivitas di kawasan perkotaan Yogyakarta maka dalam hal ini pemerintah DIY membuat suatu perencanaan tersendiri untuk tata ruang Kawasan Perkotaan Yogyakarta, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010.

Menurut pasal 1 ayat 7 Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang berisikan tujuan, kebijakan pengembangan, strategi pengembangan, penetapan rencana struktur ruang wilayah, penetapan rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang wilayah. Jadi dalam adanya perbedaan budaya untuk saling mengenal tentu menjadi dasar pijakan mereka untuk membantu terjalinnya interaksi tersebut agar dalam pemanfaatan Tata Ruang dapat menjalin keseimbangan antara penduduk asli dan pendatang.

Menurut Mahrus, M. & Muklis, M. (2015) Indonesia merupakan masyarakat multikultural. Hal ini terbukti di Indonesia memiliki banyak suku

bangsa yang masing-masing mempunyai struktur budaya yang berbeda-beda. Perbedaan ini dapat dilihat dari perbedaan bahasa, adat istiadat, religi, tipe kesenian, dan lain-lain. Konsep multikulturalisme dengan mengedepankan kesepahaman, saling menghargai dan saling menghormati menjadi kunci yang sangat penting untuk mewujudkan interaksi yang akan mereka bangun.

Di kawasan Seturan yang merupakan daerah multikultur yang terdapat banyak pendatang dan juga berbagai macam kegiatan masyarakat yang berkesinambungan atau bercampur dengan masyarakat sekitar harus dapat saling memahami bahwa daerah tersebut tidak hanya terdapat masyarakat asli tetapi ada pula masyarakat pendatang yang juga berada didaerah tersebut. Dalam (*depokkec.slemankab.go.id)* menjelaskan bahwa Kalurahan Caturtunggal merupakan kawasan yang senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan yang dinamis, baik dari aspek pemerintahan, perekonomian, kependudukan maupun sosial kemasyarakatan. Secara geografis aspek itu akan berpengaruh terhadap pola kehidupan masyarakat.

Umumnya kota-kota besar banyak mengalami permasalahan tata ruang, tidak saja karena kota sejak awal telah dibangun dan bertumbuh secara alami, akan tetapi kota mengalami pertumbuhan lebih pesat, yang biasanya selalu lebih cepat dari konsep tata ruang yang diundangkan karena cepatnya laju pembangunan di perkotaan. Jumlah penduduk yang bertambah setiap tahunnya akan berakibat pada padatnya penduduk di suatu wilayah yang akan berimbas pada meningkatnya kebutuhan tempat tinggal.

Di samping pengaruh yang bersifat positf, juga membawa implikasi kehidupan. Sehingga Kalurahan Caturtunggal menjadi daerah yang sangat kompleks dengan berbagai aktivitas. Kawasan wilayah Kalurahan Caturtunggal adalah kawasan trans-sosial antara wilayah perkotaan dengan pedesaan, dengan perkembangan komunitas pendatang, pedagang, pengusaha, maupun pencari kerja yang akseleratif sehingga terjadi peningkatan kebutuhan hidup. Di samping karakteristik sosial komunitas mahasiswa dari berbagai daerah yang beragam.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana kebijakan tata ruang mempengaruhi multikulturalisme penduduk di Padukuhan Seturan, Kalurahan Caturtunggal?.
2. Apa saja Fungsi yang mempengaruhi multikulturalisme penduduk di Padukuhan Seturan, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan tata ruang pemerintah daerah Kabupaten Sleman dalam mempengaruhi multikulturalisme penduduk di Padukuhan Seturan, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Untuk mengetahui fungi yang mempengaruhi kebijakan multikulturalisme penduduk di Padukuhan Seturan, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

   Secara akademik, penelitian ini akan memberikan kontribusi positif dalam pengembangan keilmuan tentang kebijakan tata ruang pemerintah daerah Kabupaten Sleman dalam mempengaruhi multikulturalisme penduduk di Padukuhan Seturan, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Manfaat praktis

   Penelitian ini bermanfaat untuk pertimbangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Sleman terkait tentang kebijakan tata ruang dan multikulturalisme di daerah Kabupaten Sleman.

E. Kerangka konseptual

1. Kebijakan Tata Ruang

   (Wajib, 2016) menyatakan bahwa memahami pentingnya tata ruang kota, pengertian Tata Ruang menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Sedangkan pengertian kota, ditinjau dari segi geografis menurut Bintarto (1989), kota dapat diartikan suatu sistem jaringan kehidupan manusia, ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen dan coraknya yang

materialistis. Atau dapat pula diartikan sebagai bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alam dan non alami dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah di bawahnya.

Dalam Pasal 1 sub 10 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dinyatakan bahwa kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Pemerintah Republik Indonesia telah mencanangkan bahwa pembangunan nasional dilaksanakan secara terencana, komprehenshif, terpadu, terarah, bertahap, dan berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang dalam suatu tata lingkungan yang dinamis serta tetap memelihara kelestarian lingkungan hidup. Pembangunan perkotaan, merupakan bagian dari pembangunan nasional, harus berlandaskan keseimbangan antara berbagai kepentingan, yaitu keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan dunia dan akhirat, materil dan spiritual, jiwa dan raga serta individu dan masyarakat.

Kota sebagai pusat perekonomian wilayah memiliki peran yang sangat besar bagi pembangunan, dimana konstribusinya terhadap pemenuhan kebutuhan hidup warganya melahirkan berbagai permasalahan. Permsalahan yang ditimbulkan adalah dengan jumlah

penduduk yang terus bertambah dan implikasinya pada ruang kota, akan menimbulkan kesenjangan dan juga perubahan sosial yang tidak terkendali. Contohnya disini adalah ruang kota semakin padat dan berkualitas rendah, lalu lintas semrawut, penghijauan sangat kurang, terjadi banjir dan sebagainya. Kondisi kota-kota khususnya di negara berkembang, semakin hari semakin terpuruk. Meskipun, ada gejala ekonomi kota meningkat, padahal di balik itu tingkat stres warga sangatlah tinggi, jumlah orang yang sakit terus saja bertambah, jumlah penduduk dengan kualitas tinggi terus menurun, dan pada akhirnya, kota yang katanya mengalami kemajuan ekonomi itu mengalami kemunduran dalam berbagai hal.

Menurut Juwono (dalam Renaissance, 2017:184), kebijakan pembangunan dengan berbasis penataan ruang akan mewujudkan tercapainya pembangunan berkelanjutan yang memadukan pilar ekonomi, sosial budaya dan daya dukung lingkungan. Untuk itu, perlu dipahami konsep-konsep pengembangan dan penataan ruang, termasuk didalamnya issue dan permasalahan penataan ruang yang ada. Penataan ruang sebagai proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Untuk menjamin terciptanya tujuan penataan ruang, diperlukan peraturan perundang-undangan yang memberi dasar yang jelas, tegas dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pemanfaatan ruang. Jadi kesimpulannya bahwa kebijakan tata ruang harus

dapat memahami konsep-konsep yang dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat dalam segi ekonomi, sosial budaya, dan daya dukung lingkungan sekitar.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Dan Bupati Sleman pada bab 1 pasal 1 (16) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031, yang selanjutnya disingkat RTRW, adalah hasil perencanaan tata ruang yang berisikan tujuan, kebijakan dan strategi, rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Sleman. (18) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai

tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Gambar 1.1. Peta Padukuhan Seturan

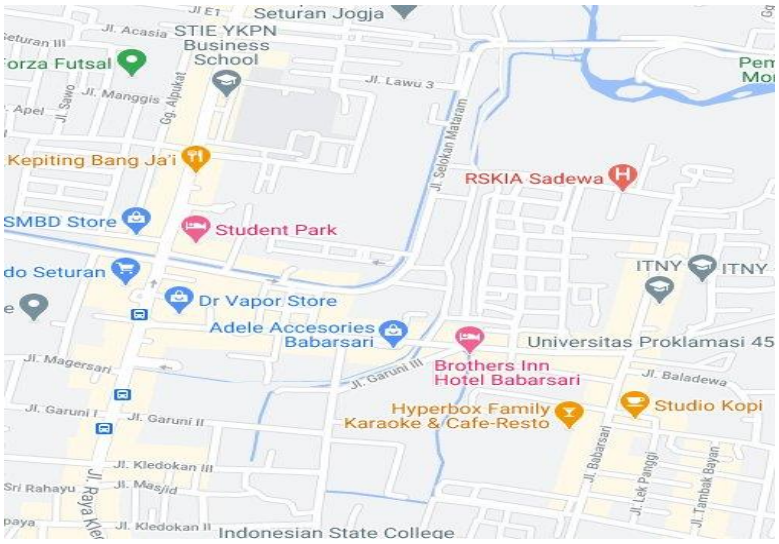

Sumber : Google Maps

Daerah seturan terletak di Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta. Daerah Seturan merupakan daerah yang padat penduduk dengan berbagai macam fasilitas umum seperti kampus-kampus ternama negeri maupun swasta, hotel-hotel, tempat hiburan malam, dan juga berbagai macam warung makan yang terdapat di kawasan seturan.

2. Multikulturalisme

Multikulturalisme telah digunakan untuk memberikan gambaran makna hubungan konsep-konsep mengenai heterogenitas budaya, kesetaraan manusia, saling menghormati, hak minoritas, hak ragam etnik, partikularitas budaya, prinsip anti diskriminasi, identitas kolektif, perlindungan dan akomodasi budaya, segmentasi masyarakat, konflik dan konsensus, integrasi sosial, dominasi politik, rekognisi dan perbedaan, dan

perlindungan atas kekerasan (Bambang, 2015). Dalam beberapa tahun terakhir ini, multikulturalisme sebagai epistemologi telah digunakan secara luas dalam bidang sosial, budaya, politik, arsitektur, *urban planning* dan spasial. Jadi, elaborasi hubungan kebijakan tata ruang dengan multikulturalisme adalah kebijakan tata ruang sendiri mengatur wilayah atau daerah yang didalamnya terdiri dari berbagai macam budaya, kesetaraan manusia, saling menghormati, hak-hak warga masyarakat dan melindungi warga yang bertempat tinggal didalam satu wilayah dengan masyarakat yang masuk didalamnya agar tidak terjadi penyimpangan atau gesekan-gesekan antar penduduk asli dengan pendatang, penduduk asli dengan penduduk asli, dan antara pendatang dengan pendatang yang lainnya. Menurut Daud Aris Tanudirjo dalam (Kemdikbud, 2015) istilah "multikulturalisme" tidak mudah dipahami, karena sesungguhnya adalah konsep politik. multikulturalisme bukan doktrin politik pragmatik, melainkan cara pandang manusia, karena banyak negara di dunia terdiri dan tersusun dari beranekaragam kebudayaan. Dimana perbedaan menjadi asasnya sehingga konsep kebijakan multikulturalisme ketika ditransformasikan kepada dunia politik menjadi politik pengelolaan pemberdayaan kebudayaan warga negara. Menurut Irhandayaningsih (2012) terdapat tiga model kebijakan multikulturalisme, yang pertama mengedepankan nasionalitas dimana sosok baru yang dibangun bersama tanpa memperhatikan aneka ragam suku, bangsa, agama dan bahasa, fungsi dari nasionalitas ini sebagai perekat integrasi. Kedua yaitu model

nasionalitas-etnik yang berdasarkan kesadaran kolektif etnik yang kuat dan berlandaskan hubungan darah, kekerabatan dengan pendiri negara.

Dalam Menurut Dworkin dalam *Stanford Encylopedia of Philosophy* (2010), multikulturalisme dimandaat kan dalam politik, khususnya politik identitas. Oleh karena itu, multikulturalisme mempunyai berbagai makna yang dapat dikaitkan dengan konteks penggunaannya. Multikulturalisme berbeda dengan multikultural yang diartikan "berbagai budaya", karena multikulturalisme sebenarnya muncul sebagai kebijakan pemerintah dalam memperlakukan warganya. Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh pemerintah Kanada pada tahun 1965 untuk menjamin kesetaraan kedudukan warga negaranya. Disebutkan, multikulturalisme lahir dari keyakinan bahwa setiap warga negara itu sama kedudukannya. Multikulturalisme menjamin setiap warga dapat mempertahankan jati dirinya (*identity*), bangga terhadap nenek moyangnya (*ancestry*), dan mempunyai rasa milikinya (*sense of belonging*). Konsep ini dipandang sebagai gerakan sosial alternatif terhadap kebijakan asimilasi. Gerakan ini merupakan penegasan dalam menghargai keragaman budaya terutama dari kelompok minoritas yang selama ini tersisihkan. Selanjutnya, istilah ini lalu banyak dipergunakan di Australia dan negara lain sejak 1970an (Bennet, 2005). Jadi kesimpulannya adalah dari konteks kesejarahan Indonesia jauh lebih dulu menyadari, menghargai dan bahkan menggunakan paham multikulturalisme dibanding bangsa-bangsa lain. Sejak Indonesia merdeka, negara ini telah menunjukkan politik identitas

Bhinneka Tunggal Ika, yang maknanya tidak berbeda jauh dengan konsep multikulturalisme yang muncul di negara-negara barat.

Konsep multikulturalisme sangat diterima baik bagi bangsa Indonesia karena sangat berkaitan dengan masyarakat Indonesia yang notabenenya adalah masyarakat yang majemuk, hal ini terlihat dari wilayah Indonesia yang kepulauan, yang didalamnya terdapat berbagai suku bangsa, Indonesia memiliki 6 agama besar dunia dan mengakui enam agama tersebut sebagai agama resmi pemerintah (Islam, Kristen, Konghuchu, Khatolik, Budha, Hindu) meskipun ada 6 agama besar tetapi masih banyak masyarakat Indonesia yang menganut sistem kepercayaan *(Zubaidi, "Telaah Konsep Multikulturalisme dan Implementasi dalam Dunia Pendidikan", (Thesis tidak diterbitkan IAIN Sunan Kalijaga)*.

Jadi bagaimana pemerintah daerah DIY di kabupaten Sleman, khususnya pada kawasan Seturan memiliki kebijakan mengenai Tata Ruang dan konsep multikulturalisme antar penduduk lokal dan warga pendatang serta menjaga bagaimana terdapat keselarasan, saling menghargai dan tidak timbul konflik yang sering terjadi pada kawasan tersebut sehingga penduduk lokal dan warga pendatang dapat hidup berdampingan dan membuat kawasan tersebut menjadi pusat keramaian, pendidikan, ekonomi, agama dan juga kawasan wisata yang aman tentram serta sesuai dengan apa yang diharapkan oleh berbagai kalangan.

F. Ruang Lingkup

1. Kebijakan penataan kawasan pendidikan terhadap praktik-praktik multikultur dalam aspek pariwisata.
2. Kebijakan penataan kawasan pendidikan terhadap praktik-praktik multikultur dalam aspek ekonomi.
3. Kebijakan penataan kawasan pendidikan terhadap praktik-praktik multikultur dalam aspek sosial budaya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode kajiannya adalah studi kasus. Menurut Sugiyono (2016:7) penelitian kualitatif adalah penelitian yang merujuk pada beberapa pendekatan metodologis yang didasarkan pada prinsip-prinsip teoritis yang berbeda. Sedangkan untuk studi kasus merupakan studi tentang kekhususan dan kompleksitas suatu kasus tunggal dan berusaha untuk mengerti kasus tersebut dalam konteks, situasi dan waktu tertentu (Patton, 2002).

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif dapat memaparkan dan menghasilkan secara deskriptif atau menggambarkan penjelasan-penjelasan tentang beberapa hal yang menyangkut permasalahan tersebut. Penelitian kualitatif berdasarkan atas fakta-fakta yang ada, sehingga penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat suatu prediksi tertentu.

2. Unit Analisis

a. Obyek Penelitian

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah kebijakan tata ruang dan multikulturalisme.

b. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan sumber informasi atau pihak yang mengetahui tentang informasi dari penelitian yang dilakukan. Dengan demikian subyek penelitian dalam penelitian ini adalah penataan kawasan pendidikan terhadap praktik-praktik multikultur di Padukuhan Seturan, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1) Informan

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2016), teknik ini adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu, yang bertujuan untuk menghasilkan sampel yang secara logis dapat mewakili populasi. Adapun yang menjadi informan di dalam penelitian ini adalah:

a) Pemerintah Desa : Perangkat Kalurahan (2 orang).

b) Masyarakat (10 orang dari masyarakat asli maupun pendatang).

c. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Padukuhan Seturan, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa

Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan selama satu bulan, yaitu pada bulan Juni hingga bulan Juli 2021.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan sifat penelitian karena mengadakan pengamatan secara langsung atau disebut pengamatan terlibat, dimana peneliti juga menjadi instrumen atau alat dalam penelitian. Sehingga peneliti harus mencari data sendiri dengan terjun langsung atau mengamati dan mencari langsung ke beberapa informan yang telah ditentukan sebagai sumber data. Pada metode ini, penulis menjadi bagian dari setiap aktivitas yang ada dalam organisasi sasaran (Faisol, 1990).

Dalam melakukan observasi, peneliti akan mengamati secara langsung keadaan/ kondisi lokasi tempat program diimplementasikan, sehingga peneliti dapat menggambarkan secara benar keadaan di lapangan.

b. Wawancara Mendalam (*indepth interview*)

Wawancara menurut Lexy J Moleong (2001 : 135) dijelaskan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud-maksud tertentu. Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (*face to face)* untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan medapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian.

c. Dokumentasi

Metode ini digunakan peneliti untuk memperoleh data dan informasi pendukung yang merupakan data sekunder. Menurut Guba dan Lincoln (1981) sebagaimana dikutip oleh A. Sonhadji KH (1994), pembuatan catatan lapangan yaitu gambaran umum peristiwa yang telah diamati oleh peneliti. Daftar data-data (dokumen) yang akan diambil antara lain:

1) Profil Desa.
2) Peraturan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Sleman.

4. Teknik Analisis Data

Singarimbun dan Effendi (dalam Wahyu Mardianto, 2013) menyatakan bahwa analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diintepretasikan. Sugiyono (2012: 244) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data (wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi) dengan cara mengorganisir data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit- unit, melakukan sintesa, menyusun kesalahan pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa data secara deskriptif kualitatif yaitu menganalisa data menggunakan kata- kata tanpa menggunakan angka

dalam bentuk deskripsi. Dalam menganalisis data, peneliti akan berpedoman pada langkah- langkah berikut ini:

a. Pengumpulan data

Disini peneliti akan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Dalam pengumpulan data, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian iniadalah dengan melakukan wawancara secara langsung.

b. Penilaian data

Dalam tahap ini data yang diperoleh dari berbagai sumber akan diteliti dengan mempersiapkan prinsip validitas, sehingga data yang relevan saja yang digunakan.

c. Penafsiran data

Selanjutnya akan dilakukan analisa data dan interprensi terhadap berbagai fenomena, gambaran dan hubungan sebab-akibat dari faktor-faktor yang akan diteliti. Dalam menganalisis data penyusunan menggunakan pendekatan *interpretative* (Hadi, 1984: 49).

5. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Menurut Meleong (2011: 330) menyatakan triangulasi adalah teknik keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Penelitian ini menggunakan sumber, dimana peneliti membandingkan dan mengoreksi ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dicapai dengan

jalan membandingkan hasil wawancara dengan observasi dengan suatu wawancara, dokumen yang berkaitan. Dengan langkah uji keabsahan data tersebut, penulis memiliki kredibilitas tinggi (dapat dipercaya), objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti selaku instrumen dalam penelitian ini.

BAB II
GAMBARAN UMUM KALURAHAN CATURTUNGGAL

A. Gambaran Geografis

Kalurahan Caturtunggal merupakan salah satu kalurahan dari delapan puluh enam kalurahan yang terletak di wilayah Kabupaten Sleman. Kalurahan Caturtunggal adalah satu dari tiga Kalurahan yang terletak di wilayah Kapanewon Depok. Selain itu, kalurahan ini merupakan satu-satunya wilayah Kapanewon Depok yang berbatasan langsung dengan Yogyakarta. Menurut data geografis Kalurahan Caturtunggal, kalurahan ini sendiri memiliki luas wilayah sebesar 889.745 ha (8.90 km^2), dengan rincian luas tegal 136.9658 ha, persawahan 30.2150 ha, pekarangan 679.0884 ha dan lain-lain seluas 43.4758 ha.

Sejarah terbentuknya Kalurahan Caturtunggal berawal dari gabungan 5 Kalurahan lama yakni; Karangwuni, Mrican, Demangan, Ambarukmo, dan Kledokan. Berdasarkan Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1946 mengenai Pemerintahan Kalurahan, maka kelima kalurahan ini digabung menjadi satu desa yang otonom menjadi Desa Caturtunggal. Pembentukan desa ini secara resmi ditetapkan melalui Maklumat Nomor 5 Tahun 1948 tentang Perubahan Undang-Undang Kelurahan.

Pada tahun 2019, terjadilah perubahan nomenklatur kelembagaan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Perubahan nomenkaltur ini tercantum pada Peraturan Gubernur No. 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan

Kalurahan. Hal ini diatur agar menyelaraskan tugas dan fungsi kooordinator perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan pada perangkat daerah. Oleh sebab itu, terjadilah perubahan nama dan susunan pemerintahan Desa Caturtunggal. Nama Desa Caturtunggal sendiri berganti menjadi Kalurahan Caturtunggal untuk menyelaraskan dengan peraturan tersebut.

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kalurahan Caturtunggal dalam Peta Wilayah Kapanewon Depok

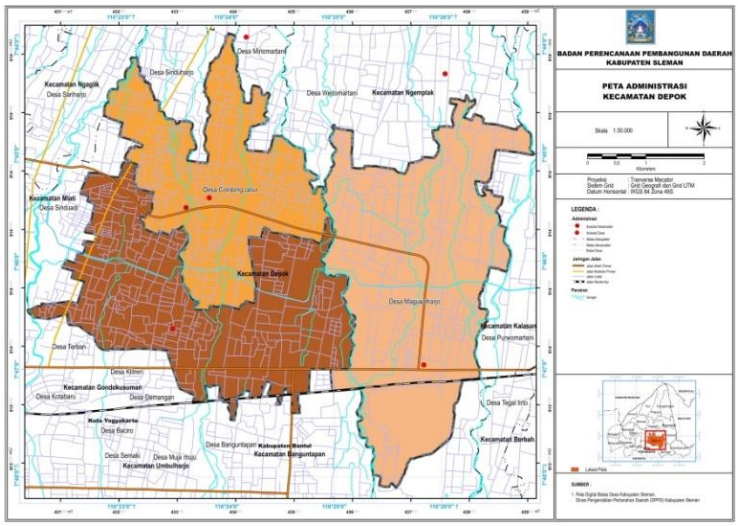

Sumber : Bappeda Kabupaten Sleman

Berdasarkan peta di atas, secara administratif Kalurahan Caturtunggal (berwarna coklat tua) berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok.

Sebelah Barat : Kalurahan Sinduadi, Kapanewon Mlati.

Sebelah Selatan : Kalurahan Banguntapan dan Kota Yogyakarta

Sebelah Timur : Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok.

Berdasarkan susunan wilayah pemerintahan di Kalurahan Caturtunggal sendiri, terbagi atas 20 padukuhan, 93 RW, dan 296 RT. Padukuhan yang ada di Kalurahan Caturtunggal antara lain; Manggung, Karangwuni, Kocoran,

Blimbingsari, Sagan, Samirono, Karangmalang, Karanggayam, Mrican, Santren, Papringan, Ambarukmo, Gowok, Nologaten, Tempel, Janti, Ngentak, Tambakbayan, Kledokan, dan Seturan.

Terkait orbitasi Kalurahan Caturtunggal, dipaparkan pada tabel dibawah:

Tabel 2.1. Orbitasi Kalurahan Caturtunggal

Tempat	**Jarak**	**Nama Tempat**
Jarak dari Ibu kota Kecamatan	1.5 Km	Kalurahan Condongcatur
Jarak dari Ibu kota Kabupaten	10 Km	Kapanewon Sleman
Jarak dari Ibu kota Provinsi	5 Km	Kota Yogyakarta
Jarak dari Ibu kota Negara	630 Km	DKI Jakarta

Sumber : Profil Kalurahan Caturtunggal

Secara umum, keadaan tanah di Kalurahan Caturtunggal termasuk dalam kategori subur. Wilayah Kalurahan Caturtunggal dilintasi oleh 3 sungai, yaitu Sungai Code, Sungai Gajah Wong, dan Sungai Tambakboyo. Lebih rincinya, untuk wilayah sebelah barat Sungai Gajah Wong sudah tidak lagi menjadi areal persawahan pada saat ini. hal ini dikarenakan kepadatan penduduk yang semakin meningkat. Sesuai dengan kebijakan pembangunan dari Kabupaten Sleman yang menyatakan bahwa wilayah Kapanewon Depok, termasuk Kalurahan Caturtunggal diperuntukan sebagai wilayah pemukiman penduduk, perdagangan dan jasa. Hal ini lah yang menyebabkan total luas penggunaan tanah untuk pemukiman atau lainnya di kalurahan ini tergolong besar.

B. Gambaran Demografis

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sleman tahun 2020, total jumlah penduduk Kalurahan Caturtunggal adalah 44.482 jiwa, dengan di dominasi oleh penduduk berjenis kelamin perempuan dengan total 22.557 jiwa. Sedangkan untuk berjenis kelamin laki-laki yakni 21.925 jiwa, lalu jumlah KK di kalurahan berjumlah 15.148 KK dengan rata-rata 3 jiwa per keluarganya. Sedangkan berdasarkan data penduduk Kalurahan Caturtunggal per Januari 2021, total penduduk Kalurahan Caturtunggal adalah 46.070 jiwa. Sama dengan data BPS sebelumnya, penduduk berjenis kelamin perempuan masih mendominasi penduduk kalurahan dengan jumlah 23.210 jiwa. Penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 22.860 jiwa, sedangkan untuk jumlah KK sebanyak 15.921. Hal ini menjadikan Kalurahan Caturtunggal sebagai kalurahan dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kapanewon Depok.

Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk di suatu wilayah dibagi dengan luas wilayah yang bersangkutan (per km^2). Dengan luas wilayah sebesar 8.90 km^2 dan dengan kondisi kalurahan yang tergolong dalam wilayah urban, Kalurahan Caturtunggal tergolong wilayah padat penduduk. Kepadatan penduduk di Kalurahan Caturtunggal berdasarkan data demografi kalurahan per Januari 2021 sebesar 5176 jiwa/Km.

Berdasarkan data yang digabungkan oleh peneliti dari data proyeksi penduduk BPS Kabupaten Sleman 5 tahun kebelakang (2016, 2017 dan 2018), dan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (2015 dan 2019,

maka total penduduk Kalurahan Caturtunggal mengalami fluktuasi. Walaupun data yang peneliti terima berbeda besarannya, akan tetapi hal ini menunjukan bahwa Kapanewon Depok secara umum dan Kalurahan Caturtunggal secara khusus merupakan daerah tujuan imigrasi karena tersedianya fasilitas pendidikan dan fasilitas ekonomi penunjang yang memadai.

Tabel 2.2. Perbandingan Jumlah Penduduk Kalurahan Caturtunggal

Tahun	Laki-laki	%	Perempuan	%	Total	%
2015	23.287	49.9	23.326	50.1	46.613	100
2016	40.766	49.9	40.949	50.1	81.715	100
2017	40.657	49.9	40.816	50.1	81.473	100
2018	40.538	49.9	40.867	50.1	81.225	100
2019	21.925	49.2	22.557	50.8	44.482	100

Sumber : Hasil Proyeksi Penduduk BPS Kabupaten Sleman dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman

Apabila berdasarkan secara rentang usia, maka Kalurahan Caturtunggal di dominasi oleh kelompok umur dengan usia produktif. Berikut ini merupakan data penduduk menurut usia per padukuhan:

Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Tiap Padukuhan

Nama Padukuhan	Usia				
	0-5 tahun	6-17 tahun	18-30 tahun	31-40 tahun	41-56 tahun
Ambarukmo	103	362	402	388	641
Blimbingsari	41	197	207	180	320
Gowok	155	616	648	686	1003
Janti	153	543	517	549	844
Karanganyam	111	365	397	440	581
Karangmalang	100	379	313	363	574
Karangwuni	95	322	377	359	566
Kledokan	107	336	356	393	513
Kocoran	80	353	401	335	608
Manggung	154	539	586	597	956
Mrican	141	671	701	688	1103
Ngentak	65	253	214	904	387
Nologaten	111	388	511	242	628

Lanjutan tabel 2.3.

Papringan	244	1181	1238	1242	1931
Sagan	37	140	160	128	272
Samirono	78	400	435	358	752
Santren	155	553	563	642	958
Seturan	202	584	569	771	828
Tambakbayan	203	767	879	975	1198
Tempel	132	434	449	482	655

Sumber : Profil Kalurahan Caturtunggal

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa kalurahan ini didominasi oleh penduduk berusia 18 tahun keatas. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya warga pendatang seperti mahasiswa ataupun pegawai/karyawan. Contohnya seperti padukuhan terpadat adalah Padukuhan Papringan, hal ini masuk akal karena padukuhan ini terletak dekat sarana pendidikan seperti kampus/universitas dan sarana perdagangan ataupun bisnis.

Mengkaji jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut, menurut data Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Sleman melalui BPS Kabupaten Sleman tahun 2020 menyebutkan bahwa terdapat 6 agama dan 1 aliran kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Kalurahan Caturtunggal. Untuk lebih jelas dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Kalurahan Caturtunggal

No.	**Agama**	**Jumlah (jiwa)**	**%**
1	Islam	36.560	82.2
2	Katolik	4.115	9.3
3	Protestan	3.594	8.1
4	Hindu	89	0.2
5	Konghuchu	1	0.002
6	Buddha	51	0.11
7	Kepercayaan	6	0.01
Total		44.416	100

Sumber : Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Sleman

berdasarkan data diatas dinyatakan bahwa mayoritas penduduk Kalurahan Caturtunggal beragam Islam sebesar 82,2%. selanjutnya, penduduk beragama Katolik sebesar 9.3% dan beragama Protestan sebesar 8.1%. Sedangkan 0.2% penduduk beragama Hindu dan 0.11% penduduk beragama Buddha. Sedangkan penduduk yang memeluk aliran kepercayaan Sebesar 0.01% dan beragama Konghuchu sebesar 0.002%.

C. Gambaran Ekonomi dan Pendidikan

Berdasarkan hasil obeservasi yang telah dilakukan oleh peneliti menggambarkan bahwa Kalurahan Caturtunggal merupakan kalurahan yang dinamika kehidupan masyarakatnya mengarah ke perkotaan. Hampir keseluruhan aspeknya baik dari sisi penduduk, pemerintahan, sosial kemasyarakatan mengalami perubahan dan perkembangan dinamis dari waktu ke waktu. Hal ini dikarenakan kondisi masyarakat Kalurahan Caturtunggal merupakan trans-sosial antara wilayah pedesaan dan perkotaan, seperti dengan banyaknya pendatang baik mahasiswa, pekerja, pedagang dan pengusaha. Selain itu aspek ekonomi yang telah bercorak kekotaan ketimbang pedesaan. Dengan kondisi seperti ini bisa dikatakan bahwa gambaran ekonomi dan sosial dari masyarakat kalurahan sedikit banyaknya menggambarkan keadaan perkotaan, disini yakni Kota Yogyakarta.

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu bagian terpenting dalam mengukur atau megetahui gambaran sosial masyarakat di suatu wilayah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di

wilayah tersebut. Maka dari itu, suatu wilayah membutuhkan sarana dan prasarana pendidikan.

Berkaca dari penjelasan sebelumnya, tiga kalurahan di Kapanewon Depok (Caturtunggal, Condongcatur, dan Maguwoharjo) adalah wilayah yang memiliki institusi pendidikan terbanyak di Provinsi DIY. Mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, hal ini menjadikan ketiga kalurahan ini sebagai tujuan para pelajar untuk melanjutkan pendidikan mereka. Kalurahan Caturtunggal sendiri terdapat beberapa sarana dan prasarana institusi pendidikan, baik sesuai tingkat pendidikannya ataupun status institusi. Bahkan beberapa institusi pendidikan terbaik atau ternama di Yogyakarta maupun tingkat Nasional terletah di kalurahan ini.

Berdasarakan data Potensi Desa yang dilakukan oelh BPS Kabupaten Sleman pada tahun 2019, Kalurahan Caturtunggal memiliki 1 institusi pendidikan khusus (1 SLB), 33 institusi pendidikan usia dini (TK) dan 15 institusi pendidikan dasar (13 Sekolah Dasar negeri dan 6 Sekolah Dasar swasta). Untuk pendidikan menengah dengan 8 institusi (2 SMP negeri, 2 SMP swasta, dan 4 MTs swasta). selanjutnya untuk pendidikan menengah atas dengan 6 institusi (1 SMA negeri, 1 SMA swasta, 1 SMK negeri, dan 3 SMK swasta). Selanjutnya, untuk perguruan tinggi, Kalurahan Caturtunggal memiliki 20 institusi (8 Universitas, 3 Sekolah Tinggi, 2 Politeknik, dan 7 Akademi). Dari penjelasan sebelumnya, terlihat bahwa Kalurahan Caturtunggal memiliki institusi pendidikan yang beragam, walaupun ada beberapa jenis institusi pendidikan yang tidak ada

di wilayah kalurahan (Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Aliyah). Akan tetapi dengan tersedianya infrastrukur jalan, maka penduduk desa dengan mudah mencapai fasilitas pendidikan tersebut.

2. Ekonomi

Sesuai dengan kondisi masyarakat yang heterogen, ditambah dengan kondisi geografis kalurahan yang dekat dengan Kota Yogyakarta, maka Kalurahan Caturtunggal memiliki potensi ekonomi yang memadai. Dengan adanya infrastruktur seperti akses jalan yang berkondisi baik, menjadikan desa ini banyak dijumpai pusat ekonomi seperti Hotel dan *Mall*.

Dari sisi pekerjaan penduduk, sebagian besar penduduk kalurahan Caturtunggal bekerja sebagai karyawan. Berdasarkan data yang diambil dari data Kapanawon Depok, berikut merupakan tabel data penduduk Kalurahan Caturtunggal dari segi mata pencaharian penduduk :

Tabel 2.5. Data Mata Pencaharian Penduduk Kalurahan Caturtunggal

No.	Mata Pencaharian Penduduk	Jumlah (Orang)	%
1	Pegawai Negeri	2.230	8,8
2	TNI/POLRI	215	0,8
3	Karyawan	9.865	39,1
4	Wiraswasta	8.080	32,1
5	Petani	172	0,7
6	Buruh Tani	162	0,6
7	Pengrajin	325	1,3
8	Pensiunan	2.564	10,1
9	Pengolah Jasa	1.573	6,5
Total		25.186	100

Sumber : www.depokkec.slemankab.go.id

Tabel 2.5. di atas menunjukan bahwa mayoritas penduduk kalurahan (39,1%) bekerja sebagai karyawan, selanjutnya 32.1%

penduduk bekerja sebagai wiraswasta, 10,1% pensiunan, 8,8% sebagai pegawai negeri, dan 6,5% bekerja sebagai pengolah jasa. Sisanya, penduduk masing-masing dalam prosentase yang sangat kecil yaitu bekerja sebagai pengrajin sebanyak 1,3%, diikuti oleh TNI/POLRI sebesar 0,8%, petani 0,7% dan terakhir adalah buruh tani sebesar 0,6%.

Dari gambaran pekerjaan penduduk ditas dapat disimpulkan bahwa mayoritas panduduk kalurahan bekerja sebagai karyawan dan swasta, hal ini disebabkan terjadinya pergeseran dinamika kalurahan dari agraris ke non-agraris. Ditambah dengan letak geografis kalurahan yang dinilai dapat menunjang kehidupan Kota Yogyakarta.

Untuk sarana dan prasarana ekonomi yang tersedia di kalurahan, terdapat berbagai macam bentuk. Berdasarkan ekonomi mikro seperti toko, warung atau kelontong hingga makro seperti supermarket, mall dan semacamnya. Sarana dan prasarana perekonomian di kalurahan ini tidak lepas dari tersedianya berbagai macam fasilitas pendidikan yang ada, sehingga berdampak ke sarana ekonomi masyarakat lain seperti penginapan (kost atau rumah), warung makan, jasa *laundry* dan sebagainya.

Sedangkan untuk aktifitas bisnis, berdasarkan pendataan potensi desa 2019 oleh BPS Kabupaten Sleman, Kalurahan Caturtunggal merupakan pusat perekonomian di Kapanewon Depok. Hal ini ditujukan bahwa data aktifitas ekonomi dari ketiga Kalurahan yang ada, Kalurahan Caturtunggal memiliki tempat perekonomian yang paling banyak.

Penjabarannya sebagai berikut:

Tabel 2.6. Sarana dan Prasarana Perkonomian di Kalurahan Caturtunggal

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah (Unit)
1	Kelompok Pertokoan	52
2	Pasar dengan Bangunan Permanen	1
3	Pasar tanpa Bangunan	1
4	Minimarket/Swalayan	60
5	Toko/Warung/Kelontong	998
6	Restoran/Rumah Makan	98
7	Warung/ Kedai Makanan	998
8	Hotel	30
9	Hostel/Motel/Losmen/Wisma	67
10	Bank Umum Pemerintah	998
11	Bank Umum Swasta	98
12	Bank Pekreditan Rakyat	998
13	Koperasi Simpan Pinjam	1

Sumber : BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2019

Dari tabel 2.6. diatas dijabarkan bahwa Kalurahan Caturtunggal memiliki 52 unit kelompok pertokoan, pasar dengan bangunan permanen dan pasar tanpa bangunan masing-masing berjumlah 1 unit, lalu minimarket/swalayan berjumlah 60 unit. Sedangkan untuk toko/warung/kelontong berjumlah 998 unit, restoran/rumah makan sebanyak 98 unit, warung/ kedai makanan sebanyak 998 unit, hotel 30 unit, dan hostel/motel/losmen/wisma sebanyak 67 unit.

Berdasarkan sarana keuangan yang berada di wilayah kalurahan, terdapat 998 bank umum pemerintah, 98 bank umum swasta, dan 998 bank pekreditan rakyat. Sedangkan untuk koperasi, Kalurahan Caturtunggal terdapat 1 buah koperasi simpan pinjam.

D. Gambaran Pertanian

Berdasarkan dari penjelasan BPS, pertanian merupakan kegiatan usaha yang meliputi budi daya tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan peternakan. Kalurahan Caturtunggal sendiri, karena sudah tergolong sebagai desa urban menyebabkan potensi pertanian tidak menjadi prioritas dalam potensi desa. Secara umum, hasil produksi beberapa komoditas hasil pertanian di kalurahan ini tidak sebesar kalurahan lainnya di Kapanewon Depok. Walaupun begitu untuk beberapa komoditas, hasil produksi pertanian di kalurahan ini berada dibawah Kalurahan Maguwoharjo merupakan penghasil komoditas pertanian terbesar dan lebih besar ketimbang Kalurahan Condongcatur.

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman tahun 2019, hasil produksi padi di kalurahan ini sebesar 998.29 ton. Setelah itu ada ubi jalar (68 kwintal), dan kacang tanah (6,88 kwintal). Selebihnya produksi komoditas pertanian di Desa Maguwoharjo terdiri dari petai, melinjo dan sebagainya. Sedangkan untuk hasil budi daya perkebunan seperti buah-buahan, penduduk Kalurahan Caturtunggal banyak yang membudidayakan buah-buahan seperti belimbing, duku, durian, jambu biji, sawo, alpokat, mangga, rambutan, pepaya, pisang, jambu air, nangka, dan sirsak.

Adapun jenis-jenis peternakan yang dibudidayakan oleh penduduk kalurahan antara lain sapi, kambing, ayam potong, ayam kampung, ikan dan bebek. Pemasaran hasil budi daya peternakan biasanya dijual secara langsung

kepada konsumen dan melalui pasar tradisional. Terkadang hewan budi daya dikonsumsi sendiri atau untuk acara-acara besar dan juga acara khusus yang diadakan di wilayah kalurahan.

Secara garis besar, lahan pertanian yang tersedia di Kalurahan Caturtunggal cukup terbatas. Hal ini disebabkan oleh peruntukkan lahan atau tanah yang ada di kalurahan untuk bangunan atau non-pertanian. Alasan lainnya adalah dikarenakan wilayah kalurahan merupakan daerah pinggiran kota yang terkena dampak kekotaan paling besar sehingga pembangunan pada wilayah ini juga semakin cepat. Pembangunan tersebut dapat berupa pembangunan rumah, sekolah, pertokoan, jalan dan fasilitas lainnya.

E. Gambaran Kesehatan

Dalam menunjang kegiatan masyarakat, maka sarana dan prasarana kesehatan menjadi salah satu hal yang penting bagi suatu daerah. Hal ini berkaitan dengan kesejahteraan penduduk karena kualitas dari sumberdaya manusia dapat dilihat dari aspek kesehatan masyarakat. Secara umum, Kapanewon Depok telah memiliki fasilitas kesehatan yang sangat memadai. Lalu, dengan kondisi geografis dan demografis kapanewon yang padat penduduk, membuat dengan persebaran fasilitas kesehatan sudah merata di tiap kalurahan. Sehingga mudah untuk dijangkau oleh penduduk kapanewon, terutama penduduk Kalurahan Caturtunggal.

Berikut penjabaran sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia di Kalurahan Caturtunggal :

Tabel 2.7. Ketersediaan Sarana Kesehatan di Kalurahan Caturtunggal

Nama Sarana	Jumlah
Rumah Sakit	2
Puskesmas (tidak rawat inap)	1
Dokter Praktek	201
Poliklinik	6
Apotek	26
Toko Obat	5
Total	**241**

Sumber : BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2019 dan Data Monografi Kalurahan Caturtunggal

Berdasarkan tabel 2.7. diatas menunjukan bahwa secara umum sarana kesehatan yang ada di Kalurahan Caturtunggal sudah tergolong lengkap. Namun, ada beberapa sarana kesehatan yang tidak tersedia di wilayah kalurahan seperti rumah sakit bersalin, puskesmas rawat inap dan balai kesehatan ibu dan anak. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, beberapa fasilitas kesehatan yang tidak tersedia di kalurahan juga disebabkan oleh letak geografis. Seperti salah satu rumah sakit bersalin yang berada di wilayah administrasi Kota Yogyakarta, memiliki jarak yang dekat dengan kawasan kalurahan. Selain itu, infrastruktur yang ada ataupun melewati kalurahan, dengan mudah diakses untuk mencapai sarana kesehatan. Observasi yang dilakukan oleh peneliti juga menunjukan bahwasanya sarana kesehatan di kalurahan ini telah memadai untuk melayani kebutuhan atau keperluan pelayanan kesehatan masyarakat desa.

F. Gambaran Transportasi dan Telekomunikasi

Kondisi sarana dan prasarana transportasi dan telekomunikasi antar wilayah akan turut menentukan kelancaran pergerakan penduduk. Apalagi dengan kondisi wilayah yang masuk kategori urban, seperti Kalurahan

Caturtunggal. Di Kapanewon Depok sendiri, jalan antar kalurahan berupa jalan aspal yang bisa dilalui sepanjang tahun, baik musim hujan maupun musim kemarau. Jalur transportasi utama untuk masuk maupun keluar Kota Yogyakarta sebagian besar melewati Kapanewon Depok, terutama Kalurahan Caturtunggal. Selain itu, ketersedian sarana dan prasarana telekomunikasi seperti menara pemancar sinyal, kantor pos, dan sebagainya juga mempengaruhi mobilitas penduduk. Untuk Kalurahan Caturtunggal sendiri sarana dan prasaran 2 aspek ini sudah tergolong sangat maju.

Gambaran sarana dan prasarana jalan di Kalurahan Caturtunggal berdasarkan peta Kapanewon Depok Sebagai berikut :

Gambar 2.2. Sarana dan Prasarana Transportasi di Kapanewon Depok

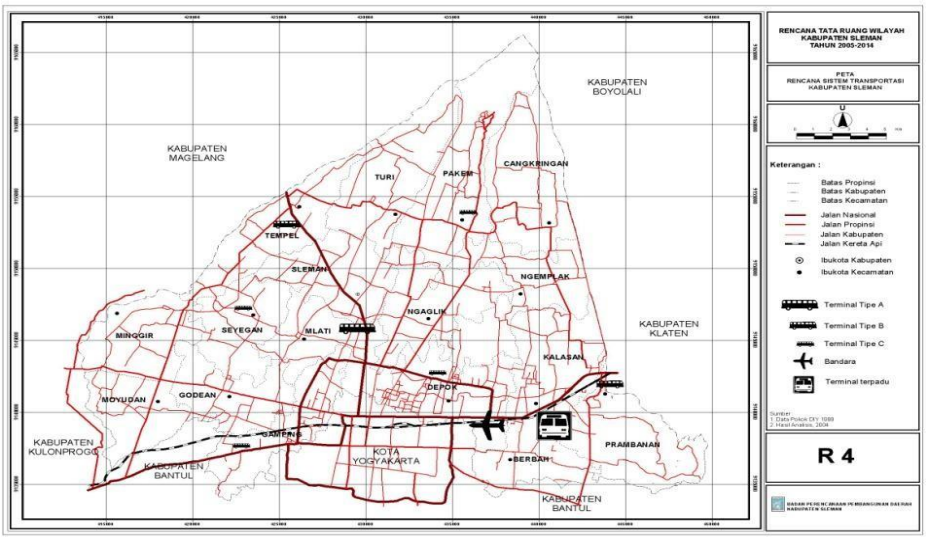

Sumber : www.depokkec.slemankab.go.id

Dari peta diatas dijelaskan bahwa Kapanewon Depok telah memiliki berbagai jenis sarana dan prasarana transportasi, seperti jalan darat, jalur kereta api, bahkan transportasi bandar udara. Sedangkan jenis jalan darat yang tersedia di kapanewon ini terdiri dari jalan nasional, jalan propinsi, dan jalan kabupaten. Dari ketiga jenis jalan ini, Kalurahan Caturtunggal dilewati

oleh seluruh jenis jalan tersebut. untuk transportasi umum berupa bus, Kalurahan Caturtunggal memiliki akses ke berbagai lokasi di Yogyakarta yang dikelola Trans Jogja. Terdapat beberapa titik halte tersebar merata di seluruh wilayah kalurahan.

Sedangkan untuk jalur kereta api, Kalurahan Caturtunggal juga dilewati jalur kereta api yang menuju atau keluar Kota Yogyakarta. Lalu, fasilitas bandar udara, memang satu dari dua bandar udara yang ada di Provinsi DIY terletak di Kapanewon Depok, yakni bandar udara Adi Sutjipto. Akan tetapi, letak bandar udara ini tidak di wilayah Kalurahan Caturtunggal, melainkan di wilayah Kalurahan Maguwoharjo.

Secara detail, untuk jenis jalan darat di Kalurahan Caturtunggal, dijabarkan melalui peta berikut :

Gambar 2.3. Jenis Jalan Darat di Kapanewon Depok

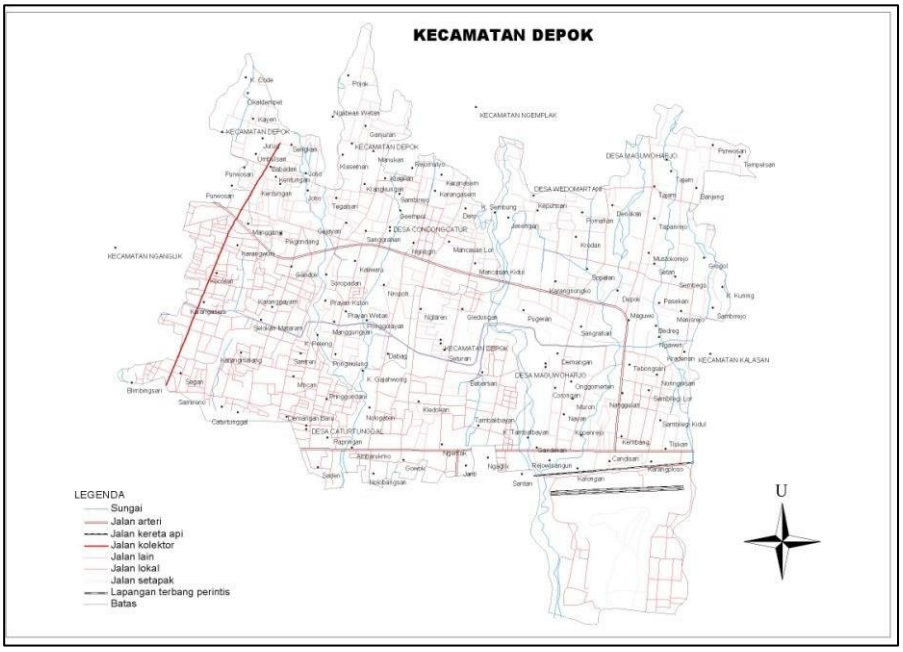

Sumber : www.depokkec.slemankab.go.id

Berdasarkan gambar diatas disebutkan bahwa terdapat beberapa jenis jalan lainnya. Untuk Kalurahan Caturtunggal sendiri, beberapa jenis jalan darat tersebut semuanya terdapat di wilayah kalurahan. Seperti, jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, jalan setapak, dan jalan lain. Dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana trasportasi di wilayah Kalurahan Caturtunggal sudah sangat memadai. Ditambah dengan wilayah kalurahan yang dijadikan wilayah penyangga Kota Yogyakarta, membuat hal ini wajar adanya.

Sedangkan untuk sarana telekomunikasi yang ada di wilayah Kalurahan Caturtunggal, terdapat berbagai macam jenis. Berdasarkan hasil data potensi desa, sarana telekomunikasi seperti jaringan pos (kantor pos, pos pembantu, dan rumah pos) dan juga perusahaan/agen jasa ekspedisi swasta banyak beroperasi di wilayah Kalurahan. Sedangkan untuk jumlah menara dan operator layanan komunikasi telepon seluler, Kalurahan Caturtunggal memiliki 74 menara telepon seluler dengan 6 penyedia jasa atau operator layanan telekomunikasi.

Dibandingkan dengan jumlah menara telepon seluler di wilayah Kapanewon Depok, Kalurahan Caturtunggal merupakan kalurahan terbanyak yang memiliki menara telekomunikasi, bahkan jumlahnya dua kali lipat dari jumlah menara telepon seluler per kalurahan (Kalurahan Maguwoharjo 37 menara dan Kalurahan Condongcatur 44 menara). Untuk kondisi sinyal telepon, telepon rumah maupun seluler, kekuatan sinyal di Kalurahan ini sangat kuat dan bagus.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Bagas Harta Kusuma. 2012. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Badan Pusat Statistik (BPS). 2016. *Kecamatan Depok Dalam Angka 2016*. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman.

Badan Pusat Statistik (BPS). 2017. *Kecamatan Depok Dalam Angka 2017*. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman.

——————————. 2018. *Kecamatan Depok Dalam Angka 2018*. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman.

——————————. 2019. *Kecamatan Depok Dalam Angka 2019*. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman.

——————————. 2020. *Kecamatan Depok Dalam Angka 2020*. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman.

Bennet, C.I. 2005. *Comprehensive Multicultural Education*. Boston: Allyn and Bacon.

Bintarto, R. 1989. *Interaksi Desa - Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Dworkin, Gerald. 2010. *Paternalism*. California: *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. *http://plato.stanford.edu/entries/paternalism/*.

Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif (dasar-dasar dan aplikasi)*. Malang.

Faizah, Arina Nurul & Hendarto, Mulyo. 2013. Analisis Difusi Keruangan Di Sekitar Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Semarang: Diponegoro Journal of Economics.

Guba, Egon G & Y Vonna S. Lincoln. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Halim, Gyvano & Roychansyah, Sani. 2018. *Perubahan Morfologi Kawasan Seturan, Yogyakarta*. Yogyakarta: Prosiding Temu Ilmiah IPLBI 2018.

Irhandayaningsih, Ana. 2012. *Kajian Filosofi Terhadap Multikulturalisme Indonesia*. Semarang: E-Jurnal Humanika Vol 15 No 09.

Kamal, Hasdian Isnan. 2021. *Paradoks Kebijakan Tata Ruang Wilayah Terhadap Desa Tepian Kota (Studi Fenomena Urban Sprawl Di Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Pemerintahan, STPMD “APMD”.

Mahrus. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Moleong, Lexy, J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Musa, Asy’Arie (2016). *Implementasi Pendidikan Multikultural.*

Neil Bissondath (2002) *Multikulturalisme dan Politik Anti Kekerasan*.

Ningsih, T. R.. 2017. *Pengaruh Keberadaan Kampus Terhadap Perubahan Fisik Kawasan di Sekitarnya (Studi Kasus: Kawasan Babarsari, Kecamatan Depok, Yogyakarta)*. Jurnal Pengembangan Kota. Vol 5 (2): 159-165. DOI: 10.14710/jpk.5.2.159-165.

Patton, Michael Q. 2002. *Qualitative Research and Evaluation Method. 3rd Edition*. Thousand Oaks, CA, London dan New Delhi: Sage Publications.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029. Yogyakarta: DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039. Yogyakarta: DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten. Yogyakarta: DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan *Kalurahan*. Yogyakarta: DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031. Yogyakarta: Bappeda Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Rustanto, Bambang. 2015. *Masyarakat Multikultur di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mania, Sitti. 2010. *Implementasi Pendidikan Multikultural dalam Pembelajaran*. Makasar: Jurnal Lentera Pendidikan.

Sonhadji, K.H. A. (1994). *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian*.

Singarimbun, Masri. Effendi. 2013. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.

Sutrisno, Hadi. 1984. *Metodologi Research*. Yogyakarta.

Undang Undang No. 26 Tahun 2007 *Tentang Penataan Ruang*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Undang Undang No. 24 Tahun 1992 *Tentang Penataan Ruang dan Ruang Udara*.

Wajib. Nurwino. 2016. *Memahami Pentingnya Tata Ruang Kota*. Medan: Direktorat Pengembangan Kawasan Pemukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Widhyharto, Derajad S. 2009. *Komunitas Berpagar: Antara Inovasi Sosial dan Ketegangan Sosial (Studi Kasus Komunitas Berpagar di Propinsi D.I Yogyakarta, Indonesia)*. Yogyakarta: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 13, Nomor 2, November 2009.

Situs Resmi *Kapanewon* (Kecamatan) Depok. https://depokkec.slemankab.go.id/desa/desa-caturtunggal. Diakses pada tanggal 1 Juni 2021.

Daftar Wawancara

Wawancara dengan Plt. Ulu-Ulu Kalurahan Caturtunggal, Andi Suwarno, SIP, pada tanggal 19 Juli 2021.

Wawancara dengan Kamituwo Kalurahan Caturtunggal, Kirwanto pada tanggal 19 Juli 2021.

Wawancara dengan Warga Kalurahan Caturtunggal, Iswanto Sigit Wibowo pada tanggal 15 Juni 2021.

Wawancara dengan Warga Kalurahan Caturtunggal, Muhammad Soleh pada tanggal 15 Juni 2021.

Wawancara dengan Warga Kalurahan Caturtunggal, Febby Ariadi pada tanggal 15 Juni 2021.

Wawancara dengan Warga Kalurahan Caturtunggal, Eko pada tanggal 20 Juni 2021.

Wawancara dengan Warga Kalurahan Caturtunggal, Ahmad Sirojul pada tanggal 20 Juni 2021.

Wawancara dengan Warga Kalurahan Caturtunggal, Agustina pada tanggal 23 Juni 2021.

Wawancara dengan Warga Kalurahan Caturtunggal, Herdian Widhasukma pada tanggal 23 Juni 2021.

Wawancara dengan Warga Kalurahan Caturtunggal, Nico pada tanggal 23 Juni 2021.

Wawancara dengan Warga Kalurahan Caturtunggal, Andi pada tanggal 23 Juni 2021.

Wawancara dengan Warga Kalurahan Caturtunggal, Reza Kusuma pada tanggal 30 Juni 2021.